

# ASESMEN KEBUTUHAN UNTUK PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL FAKULTAS TARBIYAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG

Wahid Murni  
(Dosen Program Pascasarjana UIN Malang)

## ***Abstract***

*The research problems of this study are: (1) How the content of 2006 curriculum for economic and the curriculum of social science of the primary and secondary school is? (2) How is the response of the alumni for the content of the curriculum? (3) What kind of curriculum of social science that is appropriate for the expectation of the society. The research method used in this study in order to answer the research problems is comparative non-hypothesis research. This study is conducted by comparing the standard competence of economic and social science of the primary and secondary school with the curriculum of social science (which is prepared by the student teacher of the program). Moreover, the data are obtained by using questioner and interview with the alumni of the program to strengthen the research findings from the documentary research of the document of the curriculum. The findings indicate that (1) the content of the economic curriculum did not change significantly compared with the previous curriculum, while the content of social science of 2006 curriculum is given as integrated science. It is different from 1994 curriculum where the content of social science was given separately. (2) the response of the alumni indicate the positive response since most of the alumni state that the knowledge they get could support their careers, and (3) In order to prepare economic teacher, it can be considered that the recent curriculum is very valuable, while for the specific program it is considered less valuable. Therefore, the researcher recommends making a team of curriculum improvement for social science who concentrate to the education of integrated social science. This team is suggested to have some staff: (1) the official staff of the faculty (2) the organizers of the program, (3) the alumni and (4) the teachers as the team of social science teacher, and also any other stakeholders.*

*Keyword: Assesment, Improving, curriculum, IPS*

## **PENDAHULUAN**

Selama tiga puluh tahun terakhir ini pengembangan sumberdaya manusia telah menjadi topik pembicaraan dan kajian di mana-mana,

terutama dalam kaitan dengan pembangunan ekonomi suatu negara atau wilayah. Hal ini merupakan bukti bagi pengakuan terhadap harkat kemanusiaan dan perlakuan terhadap manusia yang lebih manusiawi. Sebenarnya gerakan kearah perlakuan terhadap manusia yang lebih manusiawi itu telah dimulai lama sebelumnya, yaitu dari gerakan dalam bidang pendidikan yang menuntut perubahan dari “pendidikan berpusat pada guru” (*teacher centered education*) ke “pendidikan berpusat pada siswa” (*student centered education*), dan gerakan dalam bidang industri yang menuntut perubahan dari “manajemen ilmiah” (*scientific management*) ke “manajemen humanistic” (*humanistic management*) (Suryabrata, 2004:1).

Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan sudah seharusnya mengikuti perkembangan atau perubahan ini. Sebab dari lembaga inilah, sebagian besar aktor-aktor pembaharu dihasilkan. Oleh karena itu sebagian besar perguruan tinggi melakukan seleksi yang ketat terhadap calon mahasiswanya. Beberapa alasan mengapa perguruan tinggi bersifat selektif dalam menerima mahasiswa barunya sebagaimana dikemukakan oleh Suryabrata (2004:2) sebagai berikut:

1. Perguruan tinggi merupakan tempat menyiapkan calon-calon pemimpin masyarakat yang akan datang; oleh karena itu pembuat kebijakan dan pimpinan perguruan tinggi menginginkan “kepastian” bahwa para mahasiswa yang disiapkan untuk menduduki posisi-posisi penting di masa yang akan datang itu adalah individu-individu yang benar-benar bermutu sesuai dengan yang diharapkan.
2. Kesempatan untuk belajar di perguruan tinggi adalah semacam kesempatan yang langka, yang karenanya disediakan bagi mereka yang benar-benar berhak mendapatkannya, yaitu mereka yang tergolong “bibit unggul” dari angkatan muda suatu bangsa.
3. “*Human talent*”, yaitu potensi yang dimiliki oleh para calon mahasiswa, adalah sesuatu yang sangat berharga, dan tiada seorangpun yang bersedia menyia-nyiakannya.
4. Pendidikan tinggi adalah suatu upaya yang sangat mahal, karena itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin.

Evaluasi program yang ada di perguruan tinggi sudah selayaknya dilakukan secara terus-menerus, sebab suatu program yang dibutuhkan pada saat lampau belum tentu diperlukan pada saat ini atau pada masa yang akan datang. Untuk itulah tinjauan akan keberadaan kurikulum program studi di perguruan tinggi mutlak dilakukan. Hasil tinjauan dapat berupa rekomendasi untuk perbaikan atau penyesuaian kurikulum sebagaimana tuntutan kebutuhan masyarakat di masa yang akan datang atau bahkan penutupan suatu program studi.

Demikian halnya keberadaan program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial pada Fakultas Tarbiyah di Universitas Islam Negeri (UIN) Malang selayaknya sudah harus dievaluasi kembali, mengingat perubahan yang terjadi di masyarakat pada saat ini luar biasa cepatnya. Perubahan kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah misalnya, telah merubah cara pandang memperlakukan siswa dari obyek menjadi subyek didik, demikian halnya juga merubah sebagian materi ajar yang harus dikuasai oleh peserta didik dan bahkan juga merubah struktur mata pelajaran yang harus disajikan. Oleh sebab itu, sebagai penghasil lulusan yang memiliki kewenangan mengajar mata pelajaran IPS (Ekonomi) di samping sebagai lulusan yang memiliki kecakapan hidup di luar bidang kependidikan seperti: karyawan, wiraswatawan maupun bidang kehidupan lainnya, maka identifikasi kebutuhan yang ada di masyarakat terkait dengan keberadaan program studi perlu dilakukan. Hal ini sebagai langkah atau upaya untuk me *link and match* kan kebutuhan masyarakat dengan keberadaan program studi.

Untuk mengetahui kebutuhan apa saja yang dikehendaki oleh masyarakat pengguna lulusan program studi pendidikan Ilmu Pengetahuan Soaial di masa yang akan datang, maka ditempuh dengan melakukan penelitian tentang asesmen kebutuhan untuk pengembangan kurikulum program studi Pendidikan IPS.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **1. Rekonseptualisasi Kurikulum Perguruan Tinggi**

Kurikulum perguruan tinggi dewasa ini perlu dilakukan rekonseptualisasi agar layanan dan hasil pendidikan dapat menjawab tantangan era global sebagaimana telah diuraikan pada awal tulisan ini. Acuan pelaksanaan rekonseptualisasi kurikulum ini berdasarkan pada dua acuan, yaitu acuan yuridis dan acuan tuntutan kebutuhan nyata masyarakat.

Acuan yuridis yang digunakan dalam hal ini antara lain: (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang menuntut pelaksanaan otonomi daerah dan wawasan demokrasi dalam penyelenggaraan pendidikan; (2) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa; (3) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 045/U/2000 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi; dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu Pasal 3 tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional dan Pasal 35 Ayat 1 tentang standar nasional pendidikan berkenaan dengan standar isi, proses, dan kompetensi lulusan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Pergeseran pengelolaan pendidikan ini akan berimplikasi pada penyempurnaan atau rekonseptuasialisasi kurikulum perguruan tinggi di Indonesia saat ini.

Sedangkan acuan tuntutan kebutuhan masyarakat adalah (1) laju perkembangan Ipteks dalam era global; (2) tuntutan dari pengguna hasil pendidikan (*stakeholder*) yang terkait dengan berbagai kebutuhan pembangunan; dan (3) perubahan dan perkembangan tata nilai

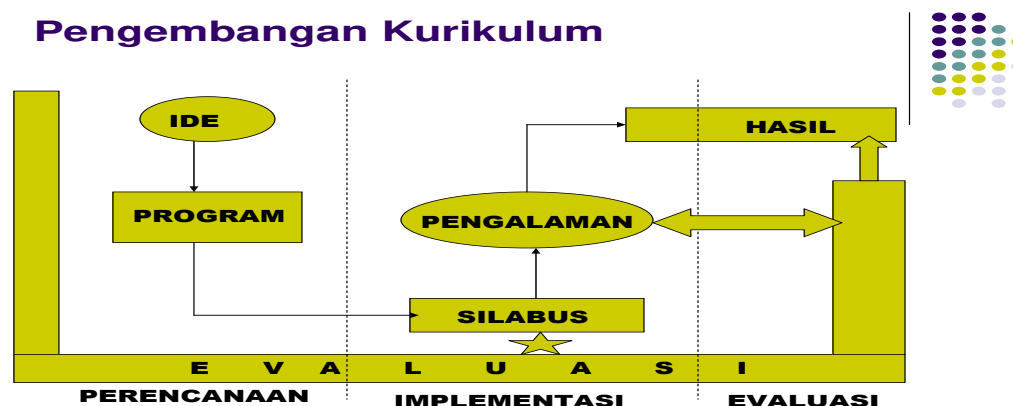
perikehidupan (demokrasi) di masyarakat; dan (3) perubahan tata pamong di negara kita yaitu adanya otonomi daerah.

Untuk itu, rekonseptualisasi kurikulum di perguruan tinggi dilakukan dengan memperhatikan: (1) filosofi Pancasila yang relevan dengan pendidikan yang mengglobal dengan empat pilar yaitu belajar untuk: menjadi diri sendiri, mengetahui, berbuat kreatif, dan hidup dalam kebersamaan; (2) tuntutan keadaan sekarang dan masa yang akan datang baik pada tingkat lokal, regional, nasional ataupun internasional; (3) perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi yang pada pemberdayaan ekonomi berbasis pengetahuan; (4)antisipasi pasar bebas dan kemampuan bersaing secara global; (5) menipisnya sumberdaya alam untuk kesejahteraan yang bergeser dari sumber daya fisik ke sumberdaya intelektual; (6) adanya tuntutan belajar sepanjang hayat, dan (7) dilaksanakan/dibingkai dalam “kesatuan dalam kebijakan” dan “keragaman dalam pelaksanaan”. Hasil rekonseptualisasi kurikulum pada perguruan tinggi kita saat ini lebih mengarah pergeseran orientasi dari kurikulum berbasis isi (*content based curriculum*) kearah kurikulum berbasis kompetensi (*competence based curriculum*).

## **2. Proses Pengembangan Kurikulum**

Secara khusus, pengembangan kurikulum Pendidikan IPS dapat diartikan sebagai (1) kegiatan menghasilkan kurikulum Pendidikan IPS, (2) proses yang mengkaitkan satu komponen dengan yang lainnya untuk menghasilkan kurikulum PIPS yang lebih baik, dan atau (3) kegiatan penyusunan (desain), pelaksanaan, penilaian dan penyempurnaan kurikulum Pendidikan IPS.

Proses pengembangan kurikulum sebagaimana digambarkan oleh Hasan (dalam Muhaimin, 2005:12) adalah,



**Gambar 1. Proses Pengembangan Kurikulum**

Gambar di atas menyiratkan bahwa dalam mengembangkan kurikulum dimulai dari kegiatan perencanaan kurikulum. Dalam menyusun perencanaan ini dimulai dari ide-ide yang dituangkan dan dikembangkan dalam program. Ide pengembangan kurikulum dapat berasal dari: (1) perubahan adanya pengembangan visi, misi, tujuan dan sasaran yang diemban, (2) perubahan ilmu dan teknologi yang semakin cepat, (3) hasil evaluasi terhadap kurikulum sebelumnya, (4) perubahan kebutuhan *stakeholders*, (5) pandangan atau saran dari para pakar/ahli, (6) tuntutan dunia global dan lain sebagainya.

### **3. Tugas Penyelenggara Program dalam Melaksanakan Asesmen Kebutuhan**

Tugas Fakultas Pendidikan IPS/jurusan Pendidikan IPS memang agak unik dan rumit karena secara simultan, menurut Somantri (2001:102) tugas-tugas tersebut adalah: “(1) harus merekayasa ilmu-ilmu sosial (universitas) dengan disiplin ilmu pendidikan, bahkan juga dengan MKDU; (2) harus memperhatikan tujuan pendidikan IPS pada tingkat pendidikan dasar dan menengah; dan (3) harus membina dan mengembangkan hasil rekayasa tersebut untuk mendidik calon gurunya dalam kerangka UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional”.

Berikut disajikan perbedaan pendidikan IPS untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan IPS untuk tingkat pendidikan tinggi,

**Tabel 1. Perbandingan Pendidikan IPS untuk Tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Pendidikan IPS untuk Tingkat Pendidikan Tinggi**

<b>Pendidikan IPS untuk Tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah</b>	<b>Pendidikan IPS untuk Tingkat Pendidikan Tinggi</b>
Pendidikan IPS merupakan penyederhanaan adaptasi, seleksi, dan modifikasi dari disiplin akademis ilmu-ilmu sosial yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan pedagogis-psikologis untuk tujuan institusional pendidikan dasar dan menengah dalam kerangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila.	Pendidikan IPS merupakan seleksi dari disiplin akademis ilmu-ilmu sosial yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah (dan psikologis) untuk tujuan pendidikan FPIPS dalam kerangka pencapaian tujuan pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila.

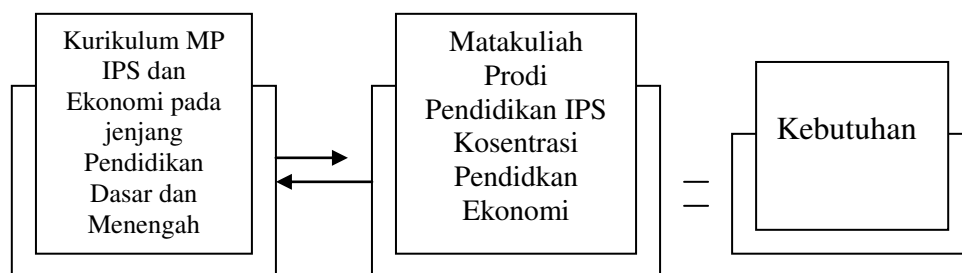
(Sumber: Somantri, 2001:103)

Ditinjau dari sejarah tentang tujuan institusional FPIPS sebagai penanggung jawab akademik pendidikan IPS bersumber pada: (1) disiplin ilmu-ilmu sosial, humaniora, dan kegiatan dasar manusia untuk isinya (content); (2) ilmu pengetahuan alam untuk metode berpikirnya; (3) disiplin ilmu pendidikan dan psikologi pendidikan untuk teori belajar dan mengajar, (4) tujuan pendidikan nasional yang melandasi butir 1, 2, dan 3 untuk sasaran yang ingin dicapai (Somantri, 2001:89). Dalam mana keempat unsur ini merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dan harus dipikirkan dalam pola berpikir integratif, sehingga secara sinergis-simbiotis-sistematis memungkinkan terjadinya “jati diri”, “*faculty culture*” FPIPS dan “*body of knowledge*” Pendidikan IPS.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini hendak mengidentifikasi berbagai kebutuhan yang ada di masyarakat terkait dengan penyiapan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan. Berdasar karakteristik masalah yang diteliti, penelitian ini

dapat diklasifikasikan ke dalam penelitian evaluasi non hipotesis, dalam mana kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan evaluasi kurikulum, yakni dengan membandingkan kurikulum program studi pendidikan IPS konsentrasi pendidikan Ekonomi dengan tuntutan kebutuhan *stakeholders* (lembaga pendidikan) yang membutuhkan guru-guru IPS dan guru mata pelajaran Ekonomi di jenjang pendidikan dasar dan menengah; kebutuhan ini tercermin dalam kurikulum mata pelajaran IPS dan mata pelajaran Ekonomi dalam kurikulum 2006. Secara sederhana kegiatan ini dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2. Model Konseptual Desain Penelitian**

Subyek penelitian ini adalah masyarakat pada umumnya, yakni masyarakat pengguna lulusan program studi seperti sekolah/madrasah, dalam mana kebutuhan mereka ditangkap melalui naskah kurikulum mata pelajaran IPS dan mata pelajaran ekonomi. Di samping itu, untuk keperluan pengumpulan data lebih lanjut, digunakan beberapa informan yang dipandang memiliki kompetensi dibidangnya terkait dengan masalah penelitian; informan yang terkait dengan penelitian ini adalah para alumni program studi yang telah memasuki dunia kerja dalam dunia pendidikan. Data lainnya dijangkau melalui angket yang dikirimkan kepada seluruh alumni yang wisuda sebelum tahun 2005. Dengan demikian, jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat berupa data kualitatif dan data kuantitatif.



Dalam melaksanakan penelitian, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci. Peneliti sepenuhnya terlibat dalam penelitian tanpa melibatkan tenaga lain untuk proses pengumpulan data. Untuk memperoleh data penelitian digunakan beberapa alat pengumpul data lain sebagai berikut: (1) pedoman wawancara, (2) pedoman dokumentasi, (3) angket atau kuesioner.

Terdapat dua jenis analisis data dalam penelitian ini, yakni (1) evaluasi naskah kurikulum, yakni dengan membandingkan naskah kurikulum pendidikan dasar dan menengah untuk mata pelajaran IPS dan mata pelajaran ekonomi dengan kurikulum program studi saat ini, sehingga dapat ditemukan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh program studi di masa yang akan datang; dan (2) analisis deskriptif. Analisis deskriptif untuk memaparkan berbagai pendapat informan tentang berbagai kompetensi yang dipersyaratkan untuk menjadi guru Pendidikan Ekonomi dan IPS serta memaparkan berbagai kompetensi yang dipersyaratkan dalam naskah kurikulum, di samping untuk menyajikan informasi yang merupakan hasil olahan data yang diperoleh melalui angket.

Untuk memperoleh temuan dan interpretasi yang absah, maka dilakukan triangulasi dengan menggunakan beberapa sumber dan teknik pengumpulan data penelitian yang berbeda. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan adalah dengan mengkaji kurikulum jenjang pendidikan dasar dan menengah, selanjutnya dilakukan pengecekan dengan menggunakan angket serta wawancara dengan informan terkait dengan pelaksanaan kurikulum di lapangan.

## TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### *1. Isi Kurikulum 2006 untuk Mata Pelajaran Ekonomi di SMA/MA*

Mata pelajaran Ekonomi diberikan pada tingkat pendidikan dasar sebagai bagian integral dari IPS. Pada tingkat pendidikan menengah, ekonomi diberikan sebagai mata pelajaran tersendiri. Menurut naskah kurikulum 2006 mata pelajaran Ekonomi bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut.

- a. Memahami sejumlah konsep ekonomi untuk mengkaitkan peristiwa dan masalah ekonomi dengan kehidupan sehari-hari, terutama yang terjadi dilingkungan individu, rumah tangga, masyarakat, dan negara.
- b. Menampilkan sikap ingin tahu terhadap sejumlah konsep ekonomi yang diperlukan untuk mendalami ilmu ekonomi
- c. Membentuk sikap bijak, rasional dan bertanggungjawab dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan ilmu ekonomi, manajemen, dan akuntansi yang bermanfaat bagi diri sendiri, rumah tangga, masyarakat, dan negara
- d. Membuat keputusan yang bertanggungjawab mengenai nilai-nilai sosial ekonomi dalam masyarakat yang majemuk, baik dalam skala nasional maupun internasional.

Berdasar isi kurikulum mata pelajaran Ekonomi di SMA/MA, menunjukkan bahwasannya isi kurikulum program studi pendidikan IPS konsentrasi pendidikan Ekonomi fakultas Tarbiyah UIN Malang, sebagai program studi yang memiliki tujuan menghasilkan calon pendidik mata pelajaran Ekonomi di jenjang pendidikan dasar dan menengah telah sangat memadai untuk mengisi jabatan ini. Hal demikian didasarkan pada pandangan bahwa semua materi yang ada di kurikulum jenjang pendidikan menengah, khususnya mata pelajaran ekonomi telah disajikan dan dikembangkan secara lebih luas di kurikulum program studi pendidikan IPS konsentrasi pendidikan Ekonomi.

## 2. Isi Kurikulum 2006 untuk Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan mulai dari SD/MI/SDLB sampai SMP/MTs/SMPLB. IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Pada jenjang SMP/MTs mata pelajaran IPS memuat materi Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, dan bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta damai.

Menurut lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2006, tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, butir Struktur Kurikulum Pendidikan Umum pada struktur kurikulum SD/MI point b, dinyatakan bahwa “substansi mata pelajaran IPA dan IPS pada SD/MI merupakan ‘IPA terpadu’ dan ‘IPS terpadu’ (2006:7). Demikian halnya untuk substansi mata pelajaran IPA dan IPS pada SMP/MTs juga merupakan ‘IPA terpadu’ dan ‘IPS terpadu’ (2006:9). Bahkan untuk jenjang pendidikan menengah, khususnya pada SMK/MAK, substansi mata pelajaran IPS juga disajikan sebagai ‘IPS terpadu’ (2006:17).

Secara gamblang, penyajian mata pelajaran IPS terpadu pada jenjang pendidikan dasar dan menengah disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.2 Penyajian Mata Pelajaran IPS Terpadu Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah**

No.	Tingkat Pendidikan	Kelas dan Alokasi Waktu											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	SD/MI	TEMATIK			3	3	3	-	-	-	-	-	-
2.	SMP/MTs	-	-	-	-	-	-	4	4	4	-	-	-
3.	SMA/MA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	SMK/MAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128 Jam*		

**Keterangan:** Untuk mata pelajaran IPS di SMK durasi waktu 128 jam merupakan jumlah jam minimal yang digunakan oleh setiap program keahlian.

Sebagai mata pelajaran dalam kurikulum baru, maka kebutuhan guru mata pelajaran IPS terpadu sangat mendesak untuk disediakan; mengingat untuk menyajikan mata pelajaran IPS terpadu dibutuhkan guru dengan kemampuan khusus. Hal ini dibuktikan dengan temuan penelitian bahwa guru-guru merasa kesulitan untuk mengajar mata pelajaran ini. Lebih-lebih guru yang mengajar di kota, hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibu Leli yang berlatar belakang pendidikan Ekonomi ketika harus mengajar IPS terpadu untuk standar kompetensi Sejarah, bahwa *“wah anak-anak sekarang sangat kritis pak, ketika mengajar bagian Sejarah saya kewalahan, misalnya ketika peristiwa perubahan dari ABRI ke TNI bukan hanya tanggalnya saja yang dibicarakan, mereka juga akan mengejar sampai latar belakang mengapa terjadi perubahan nama dan ..., jadi kita-kita ini harus mencari sumber-sumber belajar di internet”*.

Untuk kepentingan pengembangan kurikulum program studi IPS konsentrasi Pendidikan IPS terpadu hanya dapat dilakukan dengan melibatkan banyak pihak, terutama para *stakeholders* (pengguna lulusan), para guru mata pelajaran, para pakar IPS (Geografi, Sejarah, Ekonomi, Sosiologi, dan Antropologi) serta dosen atau tenaga pengajar yang terkait.

### **3. Respon Alumni terhadap Isi Kurikulum Program Studi**

Sebagian besar respon alumni terhadap kurikulum program studi PIPS masa lalu adalah sangat baik, hal ini terbukti bahwa 92,86 persen responden menyatakan bahwa ilmu yang dipelajari mendukung karir yang ia jalani sekarang. Khusus bagi mereka yang bekerja sebagai guru baik PNS maupun guru honorer, sebagian besar bahkan hampir seluruhnya menyatakan mereka mengajar mata pelajaran IPS secara terpadu, sebagaimana tuntutan kurikulum 2004 dan kurikulum 2006 yang pada saat ini sedang gencar disosialisasikan bahwa untuk mata pelajaran IPS harus disajikan secara terpadu, kondisi ini berbeda dengan kurikulum 1994 dalam mana rumpun kajian IPS disajikan secara terpisah, sehingga

mata pelajaran Ekonomi, Sejarah, Geografi disajikan secara mandiri atau berdiri sendiri.

Hal ini dapat dimaklumi karena kurikulum yang mereka pelajari sewaktu di program perkuliahan lebih terkonsentrasi pada bidang studi pendidikan Ekonomi, meskipun ada tambahan ilmu pengetahuan yang lain seperti sosiologi dan sejarah sebagai mata kuliah dalam kompetensi pendukung atau tambahan lainnya. Pengkonsentrasian pada pendidikan Ekonomi dapat dimaklumi karena pada saat itu (sebelum tahun 2004) kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah masih menggunakan kurikulum 1994, sehingga program studi IPS masih dianggap terlalu umum, dan harus mengkhusus pada peminatan pada konsentrasi tertentu. Kondisi ini juga diungkap oleh Ummi Rohmatul Munifah salah satu alumni program studi yang lulus tahun 2003 dan bekerja sebagai guru di MTs Darul Ulum Grati bahwa,

Harus ada kejelasan, studi yang terarah tentang jurusan. Kalau pendidikan Ekonomi, ya ekonomi apa? dan mata kuliahnya pun seharusnya lebih konsen ke Ekonomi. Kalau Sosial ya Sosiologi atau apa dan harus konsen juga ke ilmu-ilmu sosial. Jadi Pak Wahid yang terhormat ... Untuk saat ini yang dibutuhkan di lapangan adalah sarjana-sarjana yang jurusannya konsisten, bukan IPS secara umum.

Ungkapan di atas sesungguhnya mencerminkan kebutuhan guru dengan spesialis tertentu. Hal ini sesuai dengan tuntutan kurikulum 1994 yang berlaku saat itu.

Secara terperinci data wawancara terhadap beberapa orang alumni, khususnya guru di madrasah tsanawiyah dapat diuraikan sebagai berikut, Leli seorang mahasiswa angkatan tahun akademik tahun 2000/2001 yang lulus tahun 2004/2005 dan bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di salah satu MTs Negeri di kota Malang mengungkapkan bahwa,

Mulai tahun akademik 2005/2006 saya mengajar mata pelajaran IPS terpadu karena kurikulum 2004 mata pelajaran IPS disajikan secara terpadu, namun tahun ini (2006/2007) saya mengajar mata pelajaran ekonomi sesuai dengan latar belakang program studi saya, namun demikian sepertinya saya akan mengajar mata pelajaran IPS terpadu pada tahun depan, karena kurikulum 2006 mata pelajaran IPS disajikan secara terpadu pula. Meskipun saya dan teman-teman guru yang lain seperti guru Geografi, guru Sejarah masih harus belajar sendiri. Ini berarti kami dan murid-murid sama-sama belajar IPS. Karena latar belakang program studi guru-guru mata pelajaran IPS masih terpisah-pisah, seperti saya dari pendidikan Ekonomi, sementara guru IPS lainnya dari pendidikan Geografi dan pendidikan Sejarah.

Lebih lanjut ia mengemukakan bahwa,

Di MTs kami, setiap tahun diadakan uji kompetensi, dimana pengujinya diambilkan dari tim Universitas Negeri Malang. Tahun ini saja kami sudah melakukan ujian kompetensi, yakni uji kompetensi mata pelajaran IPS terpadu untuk guru-guru yang dulunya mengajar mata pelajaran Ekonomi, Sejarah dan Geografi, serta uji kompetensi mata pelajaran IPA terpadu untuk guru-guru yang dulunya mengajar mata pelajaran Biologi dan lain-lainnya (yang tergolong dalam rumpun mata pelajaran IPA). Uji kompetensi ini untuk menentukan layak tidaknya guru-guru tersebut mengajar mata pelajaran IPS dan IPA secara terpadu. Hasilnya untuk guru-guru IPS terpadu dinyatakan berhasil sedangkan untuk guru-guru IPA terpadu masih belum berhasil. Sehingga diputuskan untuk guru-guru IPA kembali mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikan sebelumnya secara terpisah. Akhirnya tahun ini kami juga mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikan sebelumnya.

Tugas untuk mengajar mata pelajaran IPS secara terpadu juga diungkapkan oleh beberapa alumni yang kebetulan mengajar di SMP/MTs. Misalnya seperti yang diungkapkan oleh Dyah seorang alumni yang diangkat sebagai PNS di MTsN Tumpang Malang, bahwa,

Saya tidak tahu tentang Prodi IPS UIN Malang saat ini. Berdasarkan perkuliahan yang saya terima dahulu, saya harap, di prodi IPS diberi mata kuliah "Geografi", meski hanya pengantar. Karena mata pelajaran Geografi masuk pada bidang studi IPS (terutama pada tingkat SMP), selain PKn, Ekonomi.

Hal ini juga didukung oleh pernyataan alumni-alumni yang lain sebagai berikut, Darmawan alumni tahun 2004 yang mengajar di SMP Muhammadiyah 3 kota Tegal menyatakan bahwa “di SMPN/S sekarang dengan sistem KBK, dari jurusan/prodi apapun (Geografi, Sejarah, Ekonomi), mengajarnya bidang studi sosial (IPS terintegrasi/terpadu)”. Ini juga didukung oleh pernyataan Ulinuha alumni tahun akademik 2003/2004 yang sekarang bekerja sebagai guru PNS di MTsN tanjunganom Nganjuk, bahwa” pada saat ini saya diminta untuk mengajar mata pelajaran IPS terpadu”.

Menanggapi kondisi demikian Leli, seorang alumni yang bekerja sebagai guru PNS di kota Malang, menyarankan bahwa,

“hasil sosialisai yang kami terima, bahwa untuk tahun-tahun di masa yang akan datang, yang akan diangkat adalah untuk menjadi guru IPS adalah calon-calon guru dari program studi pendidikan IPS (IPS terpadu), ini berarti bahwa nanti alumni dari program studi ini akan diangkat untuk pendidikan di SD/MI dan SMP/MTs. Sebab ini sebagaimana disyaratkan dalam peraturan pemerintah bahwa untuk mata pelajaran IPS SD/MI dan SMP/MTs disajikan sebagai mata pelajaran IPS terpadu”.

Dengan demikian jelas bahwa untuk masa yang akan datang, kebutuhan akan guru mata pelajaran IPS terpadu menjadi penting untuk dipenuhi.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil paparan data dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan beerapa hal sebagai berikut:

1. Secara garis besar tidak terdapat perbedaan yang berarti pada penyajian untuk mata pelajaran Ekonomi di SMA/MA dari kurikulum sebelumnya dengan kurikulum 2006, mata pelajaran ini disajikan secara mandiri atau terpisah dengan IPS. Sedangkan penyajian IPS untuk jenjang pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) dan jenjang pendidikan menengah khususnya di

SMK/MAK penyajian mata pelajaran IPS disajikan sebagai IPS terpadu, hal ini berbeda dengan kurikulum 1994 yang disajikan secara terpisah atau berdiri sendiri.

2. Sebagian besar respon alumni terhadap kurikulum program studi adalah sangat baik, hal ini terbukti bahwa 92,86 persen responden menyatakan bahwa ilmu yang dipelajari mendukung karir yang ia jalani sekarang. Khusus bagi alumni yang bekerja sebagai guru di MTs/SMP ternyata mereka harus mengajar mata pelajaran IPS secara terpadu sebagaimana tuntutan kurikulum 2004 dan kurikulum 2006. Hal ini masih memungkinkan bagi mereka karena pada saat belajar mereka juga memperoleh mata kuliah sosiologi dan sejarah meskipun hanya beberapa sks saja; sedangkan untuk standar kompetensi geografi mereka harus belajar mandiri.
3. Bentuk kurikulum program studi pendidikan IPS khususnya konsentrasi pendidikan ekonomi nampaknya masih sesuai dengan tuntutan untuk memenuhi kebutuhan guru ekonomi pada jenjang pendidikan menengah khususnya di satuan pendidikan SMA/MA. Namun demikian untuk memenuhi kebutuhan guru IPS pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, sudah harus dirancang bentuk kurikulum baru pendidikan IPS untuk konsentrasi Pendidikan IPS Terpadu.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, dari kurikulum 1994 ke kurikulum 2004 dan bahkan telah diterbitkan kurikulum 2006 yang pada saat ini sedang disosialisasikan pada lembaga-lembaga pendidikan di seluruh Indonesia. Lebih khusus kurikulum untuk mata pelajaran IPS di SD/MI, SMP/MTs, dan di SMK/MAK, yang dahulu mata pelajaran yang tergabung dalam IPS disajikan secara mandiri dan sekarang disajikan secara terintegrasi. Implikasinya sebagai lembaga atau



program studi yang menghasilkan calon guru, direkomendasikan kepada fakultas Tarbiyah khususnya program studi Pendidikan IPS untuk segera menyesuaikan kurikulumnya guna memenuhi kebutuhan calon guru IPS di masa yang akan datang.

### DAFTAR RUJUKAN

Ghazali, A. Syukur. 2004. *Melakukan Asesmen Kebutuhan untuk Penyusunan Kurikulum Program Studi di Perguruan Tinggi*. Makalah disajikan pada “Dialog Interaktif dan Pelatihan Pengembangan Kurikulum UNTAG’ 45 Surabaya Menuju Persaingan Kerja, di Aula Pasca Sarjana UNTAG’ 45, Surabaya, 12-13 April 2004.

*Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa*. Jakarta: Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Depdiknas.

*Kurikulum 2006 Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial untuk Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)*

*Kurikulum 2006 Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)*

*Kurikulum 2006 Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)*

*Kurikulum 2006 Mata Pelajaran Ekonomi untuk Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)*

Muhaimin. 2005. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Biro Peraturan dan Perundangan. Seskab.

*Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*

- Somantri, Muhammad, Numan. 2001. *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Editor Dedi Supriadi dan Rohmat Mulyana. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Suryabrata, Sumadi. 2004. *Pengembangan Sistem Seleksi Calon Mahasiswa Perguruan Tinggi yang Akurat dan Berkeadilan*. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional dengan tema Rekayasa Sistem Penilaian dalam rangka Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Himpunan Evaluasi Pendidikan Indonesia (HEPI), Yogyakarta, 26-27 Maret.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Beserta Penjelasannya*. 2003. Bandung: Citra Umbara.